



Reformasi Pelatihan KNIL Tahun 1938-1942: Persiapan Hindia Belanda Menghadapi Ekspansi Jepang

Taqwa Ridlo Utama ✉ & Putri Agus Wijayati
Jurusan Sejarah Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima Mei 2022
Disetujui Juni 2023
Dipublikasikan Juli 2023

Keywords:
KNIL, reformasi, sistem pelatihan, wajib militer.

Abstrak

KNIL adalah kesatuan militer pemerintah kolonial Hindia Belanda. Pada tahun 1930 an, dengan melihat ancaman terjadinya perang pasifik dan ekspansi oleh militer Jepang, pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian merencanakan melakukan reformasi dalam kesatuan KNIL sebagai upaya untuk meningkatkan kekuatan militer. Reformasi KNIL dimulai pada tahun 1936, dengan fokus awalnya yaitu dalam hal peremajaan dan peningkatan jumlah alutsista. Pada tahun 1938, pemerintah kolonial mulai merambah dan berbenah dalam bidang pelatihan militer yaitu dengan membentuk Korps Perwira Cadangan (CORO). Kemudian dengan melihat ancaman perang yang semakin didepan mata, pada tahun 1940 oleh pemerintah kolonial diputuskan untuk membentuk dinas pelatihan lainnya untuk meningkatkan jumlah pasukan yang ada. Pemerintah kolonial Hindia Belanda kemudian memutuskan untuk membangun sebuah Akademi Militer di Bandung (KMA), dan dinas Pelatihan Penerbang Cadangan (VVC). Selain itu, diputuskan juga untuk melatih milisi melalui kebijakan wajib militer. Tulisan ini akan membahas terkait pelaksanaan berbagai pelatihan militer yang telah dibentuk tersebut. Metode penelitian yang akan digunakan merujuk pada metode penelitian sejarah.

Abstract

KNIL was the military force owned by the government of the Dutch East Indies. In the 1930s, seeing the threat of a possible Pacific war and expansion by the Japanese military, the colonial government planned to carry out reforms within the KNIL unit as an effort to increase strength. Reforms began in 1936 with an initial focus on rejuvenation and increasing the number of defense equipment. In 1938, the colonial government began to improve in the field of military training by forming the Corps of Reserve Officers (CORO). After seeing the threat of war that was in sight, in 1940 by the colonial government it was decided to form another training service to increase the number of existing troops. The colonial government decided to establish a Military Academy in Bandung (KMA), and a Reserve Pilot Training Service (VVC). In addition, it was also decided to train the militias through the implementation of the conscription policy. This paper will discuss the implementation of the various military trainings that have been established. The research method that will be used is referring to historical research methods.

© 2023 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:
Ruang Jurnal Sejarah, Gedung C5 Lantai 1 FIS Unnes
Kampus Sekaran, Gunungpati, Semarang, 50229

PENDAHULUAN

Pemerintah kolonial Hindia Belanda harus dihadapkan oleh permasalahan keamanan wilayah kekuasaannya setelah stabilitas di kawasan Asia Pasifik mulai memanas di awal tahun 1930 an (Oktorino, 2016:38). Sikap Jepang yang agresif yang ditunjukkan lewat sebuah serangan dan pendudukan terhadap Manchuria pada tahun 1931, telah menjadikan sebuah ancaman yang nyata terhadap keberlangsungan kekuasaan wilayah koloni negara Barat di wilayah Asia (Lie, 2012:2).

Langkah ekspansi Jepang muncul karena diilhami oleh cita-cita besar untuk menjadi poros kekuatan dunia. Haluan sikap dan strategi Jepang dalam mewujudkan impian tersebut tertera dalam sebuah catatan yang dikenal dengan nama “Tanaka Memorial”. Tulisan tersebut dibuat oleh Guchi Tanaka (1863-1929) yang merupakan Jenderal dan ahli politik Jepang. Tulisan ini berisikan sebuah paparan rencana yang harus dilakukan oleh pihak militer Jepang untuk bisa menaklukkan seluruh wilayah Asia dan dunia. Terkait langkah yang harus ditempuh, dijelaskan bahwa Jepang harus melaksanakan politik “darah” dan “besi” dengan mengorbankan jiwa dan raga untuk bisa melebarkan sayapnya (Djajusman, 1978:8).

Kebulatan tekad Jepang ditunjukkan dengan sikapnya yang tidak memperdulikan peringatan dari Liga Bangsa-Bangsa yang mengutuk tindakan pendudukan atas Manchuria. Pernyataan tersebut dibalas Jepang dengan sebuah pernyataan pengunduran diri sebagai anggota Liga Bangsa-Bangsa (Baskara, 2009:28). Penentangan dari sikap Jepang ini telah memperlihatkan kepada dunia bahwa tujuan Jepang masih belum selesai dan masih ingin menguasai wilayah yang lain disekitarnya.

Jepang kemudian menunjukkan sikap yang semakin agresif dengan terus melanjutkan proyek-proyek penaklukan. Jepang tidak gentar terhadap segala bentuk pembatasan dari barat terkait langkah yang mereka lakukan. Dengan meningkatnya pergerakan Jepang, maka mengakibatkan stabilitas di kawasan Asia Pasifik semakin terancam. Keadaan yang semakin mengkhawatirkan ini menjadikan banyak kalangan di Hindia Belanda mulai mendesak

pemerintah untuk melakukan peningkatan kekuatan pada angkatan militernya. Terkait hal tersebut, tulisan ini kemudian akan memaparkan bagaimana langkah yang diambil pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam upayanya memperkuat angkatan perangnya, khususnya dalam hal peningkatan jumlah personil militer.

Riset sebelumnya yang membahas terkait angkatan militer kolonial Hindia Belanda, yaitu *Koninklijk Nederlandsch Indische Leger* (KNIL) telah banyak dilakukan. Namun pembahasan yang menyangkut pelatihan militer relatif masih sedikit. Penelitian dengan rentan waktu relevan seperti karya Marc Lohnstein pada tahun 2018 (Lohnstein, 2018) misalnya lebih terfokus dalam hal modernisasi alutsista, sedangkan karya dari Benjamin Bouman pada tahun 2002 (Bouman, 2002) hanya membahas pelatihan di Akademi Militer Bandung. Artikel ini berbeda dengan penelitian yang ada sebelumnya akan akan melihat secara kolektif keberlangsungan terkait dinas-dinas pelatihan militer yang baru dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam upayanya menghadapi ekspansi Jepang yaitu dalam hal peningkatan jumlah angkatan militer, seperti dengan pembentukan pelatihan *The Corps Opleiding Reserve Officieren* (CORO), *Koninklijk Militaire Academie* (KMA), *Vrijwillig Vlieger Corps* (VVC) dan juga kebijakan kebijakan wajib militer bagi untuk tambahan tentara bantuan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode sejarah sebagai dasar acuan penulisan. Urutan tahapan yang dilaksanakan yaitu berupa pemilihan topik, heuristik, verifikasi sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2005:90). Heuristik merupakan kegiatan penelusuran sumber pustaka yang dinilai masih relevan dengan topik penelitian. Terdapat dua jenis sumber yang berhasil didapatkan, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer yang terkumpul adalah berupa laporan koran sezaman seperti dalam koran *Bataviaasch Nieuwsblad*, *De Indische Courant*, *De Sumatra Post*, *Soerabaiasch-handelsblad* yang diperoleh dari koleksi situs delpher dan diterjemahkan melalui bantuan situs penerjemah. Penelusuran sumber

sekunder dilakukan dengan menelusuri koleksi seperti di Perpustakaan Museum Angkatan Bersenjata dan di berbagai situs penyedia buku maupun journal online seperti *Militaire Spectator*, *Brill*, *JSTOR*, dan *Cambridge Journal*. Langkah berikutnya berupa verifikasi sumber terkait dengan sumber yang didapat sebelumnya. Tahapan ini bertujuan untuk menguji keabsahan dan kredibilitas sumber agar bisa menyajikan sebuah data yang terpercaya. Interpretasi kemudian dilakukan untuk penyeleksian sumber yang akan dirangkai dalam proses penulisan. Setelah melakukan tahapan diatas kemudian akan dilakukan proses penulisan sejarah atau historiografi dengan penyusunan yang kronologis. Melalui tahapan tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah karya yang bersifat objektif dan terstruktur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Sejarah Angkatan Militer KNIL

Sejarah KNIL tidak bisa lepas dari sejarah panjang perkembangan angkatan militer pemerintah kolonial Hindia Belanda. Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris pada tahun 1816, pemerintahan kolonial Hindia Belanda harus membangun kembali organisasi militernya yang mengalami kekacauan selama masa pendudukan Inggris. Tercatat angkatan pertama yang dikirim kembali ke Hindia Belanda adalah sebuah brigade yang terdiri dari dua batalyon yang berjumlah 1727 orang. Brigade ini tiba di Hindia Belanda pada bulan Mei 1816 dan ditempatkan di sejumlah wilayah sentral (Buiskool, 1941:20). Seiring berjalannya waktu, kesatuan tersebut kemudian mendapatkan tambahan personil, baik itu personil yang dikirim dari Belanda maupun personil tambahan yang terdiri dari orang pribumi.

Diperkirakan pada tahun 1818, mengenai jumlah personil militer kolonial Hindia Belanda yaitu sebanyak 10.475 personil. Jumlah tersebut diantaranya adalah terdiri dari 469 personil golongan perwira yang semuanya merupakan orang Eropa, ditambah personil biasa yang terdiri dari orang Eropa sebanyak 4.656 dan personil pribumi sebanyak 5.350. Dari angka tersebut

maka terlihat perbandingan antara pasukan Eropa dengan pribumi pada tahun 1818 yaitu masih setara yang berkisar 1:1 (Groot, 2009:44).

Pada kisaran tahun-tahun awal tersebut, kesatuan militer ini masih terikat langsung dan berada dibawah naungan tentara induk Kerajaan Belanda. Kesatuan militer yang bertugas di Hindia Belanda masih belum terbentuk sebagai organisasi yang mandiri. Suplai personilnya juga masih tergantung lewat keputusan tentara induk kerajaan Belanda. Baru kemudian pada tahun 1830 tentara di Hindia Belanda mendapatkan organisasinya sendiri dan memisahkan diri dari tentara kerajaan Belanda. Pada tahun 1833 Raja Willem I meresmikannya dengan nama *Koninklijk Nederlandche Oos Indische Leger* (KNIL) (Groen, 2012:279).

Lewat keputusan tersebut secara resmi menjadikan KNIL sebagai angkatan perang pemerintah kolonial Belanda di Hindia Belanda. Terkait kedudukannya sebagai angkatan perang, maka tugas utama kesatuan ini adalah berkaitan dengan peperangan, baik itu perang untuk tujuan penaklukan maupun perang untuk menghadapi pemberontakan. Selain peperangan, tugas KNIL juga berkaitan langsung dengan masalah keamanan yaitu untuk menciptakan perdamaian, ketertiban, dan kontrol sosial penduduk lokal sehingga patuh terhadap peraturan (Moor, 2008:136).

Terkait komposisi keanggotaan, angkatan militer KNIL ini bersifat multinasional. Untuk serdadu eropa sendiri yaitu untuk persentase orang Belanda menyumbang yaitu sekitar 60 persen, sisanya 40 persen lainnya berasal dari negara tetangga, seperti Belgia, Jerman, Swiss, dan Perancis. Perekutan para personil sebagian besar berada di wilayah Harderwijk, wilayah yang dikenal sebagai tempat para sampah masyarakat di Eropa. Sedangkan untuk perekutannya menggunakan sistem kontrak (Suyono, 2003:324).

Kemudian untuk serdadu KNIL dari kalangan pribumi yang merupakan serdadu rendahan umumnya diambil langsung dari pemuda desa. Sistem rekrutmenya yaitu melalui kerja sama dengan kepala desa setempat yang nantinya akan diberi uang panjer. Perekutan personil dilaksanakan di pulau Jawa, Sulawesi Utara, dan Maluku. Rekrutan yang berasal dari

luar Jawa kemudian diangkut dengan kapal ke Jawa. Serdadu KNIL ini biasanya berasal dari daerah yang miskin seperti misalnya dari daerah Bagelen, Jawa Tengah yang memiliki tanah yang tidak subur. Daerah dengan keadaan alam yang subur semacam Jawa Barat lebih sedikit memberikan pemudanya untuk masuk KNIL (Joehana, 2018:24).

Selain diperkuat oleh serdadu pribumi, KNIL juga diperkuat oleh tentara kulit hitam yang didatangkan dari Afrika Barat. Antara tahun 1832 sampai 1872, Lebih dari 3.000 serdadu Afrika dikirim ke Jawa sebagai rekrutan untuk tentara kolonial Belanda. Prajurit kulit hitam ini memiliki posisi yang rendah dibanding tentara eropa, namun dianggap lebih unggul dari prajurit pribumi. Ketika jumlahnya semakin meningkat, golongan ini memutuskan untuk menetap dengan keluarga Indo-Afrika mereka dalam satu kota-kota garnisun di Jawa yang bertahan sampai Indonesia merdeka (Kessel, 2014:41-42).

Mengenai jumlah personil, dikarenakan eksistensinya yang begitu panjang maka jumlah personil KNIL mengalami perubahan di setiap periode. Perubahan tersebut biasanya akan terlihat mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah pada periode sebelumnya. Peningkatan yang tinggi juga akan terlihat ketika KNIL sedang dihadapkan pada masa peperangan.

Pada menjelang tahun 1929, diketahui jumlah kekuatan KNIL mencapai angka 38.568 personil. Untuk perbandingan jumlah personil sendiri yaitu untuk pasukan Eropa dan pribumi sekitar 1:5. Pasukan dengan komposisi terbanyak dipegang oleh orang pribumi Jawa dengan jumlah 16.873 personil. Sedangkan untuk orang Eropa yang sebagian besar adalah orang Belanda walaupun jumlah perbandingan mereka semakin mengecil, namun personil eropa ini memasok untuk hampir semua perwira dan sejumlah besar NCO (Groot, 2009:4).

Eksistensi Dinas Pelatihan KNIL

Setelah kembalinya kekuasaan dari tangan Inggris pada tahun 1816, Belanda baru membangun kembali sekolah militernya yaitu pada tahun 1818. Sekolah militer ini dibangun di Semarang dan ditujukan sebagai tempat

pelatihan para perwira dan surveyor angkatan darat dan laut. Keberadaan sekolah ini kemudian tersendat setelah mengalami pemotongan anggaran pada tahun 1826 dan kemudian dibubarkan (Klinkert & Groen, 2005:1). Dari tahun 1830 hingga 1882 kemudian terdapat sebuah sekolah di Weltevreden (daerah Jakarta Pusat) yang khusus untuk pelatihan perwira artilleri. Sekolah di Weltevreden ini juga dari tahun 1834 hingga 1835 dijadikan sebagai pusat pelatihan dan seleksi untuk mereka yang menginginkan pangkat perwira di semua divisi (Wijnmalen, 1883:17).

Untuk memenuhi kebutuhan perwira, mulai tahun 1840 mulai didatangkanlah lulusan dari Akademi Militer Kerajaan Belanda atau *Koninklijk Militaire Academie* (KMA) di Breda. Namun jumlah perwira yang disuplai ke Hindia Belanda antara tahun 1840-an dan 1850-an masih belum memenuhi kebutuhan, khususnya pada kesatuan infanteri (Klinkert & Groen, 2005:1). Pemerintah Kolonial kemudian menyadari bahwa mereka tidak bisa hanya mengharapkan suplai dari negeri induk Belanda untuk memenuhi kebutuhan personilnya, khususnya untuk jabatan perwira. Oleh karena itu, mereka kemudian memutuskan membangun sekolah militer untuk melatih para personil di Hindia Belanda.

Pada bulan September 1852 dibangunlah sekolah militer di Meester Cornelis (Jatinegara), Jakarta. Pelatihan di sekolah ini dapat tumbuh dengan baik dan memiliki eksistensi yang cukup panjang. Pada tahun-tahun awal, antara tahun 1852 sampai 1854 sekolah ini sudah berhasil memiliki 89 murid dengan 58 dari mereka berhasil menjadi perwira. Mengenai lama pelatihan, awalnya lama pelatihan di Meester Cornelis ini hanya berlangsung selama satu tahun, baru kemudian di tahun 1860 mulai digandakan menjadi dua tahun. Perubahan kembali terjadi pada tahun 1872, lama pelatihan menjadi berlangsung selama tiga tahun, hal ini bertujuan untuk menaikkan level pendidikan (Klinkert & Groen, 2005:1).

Sistem penerimaan di Meester Cornelis awalnya hanya ditujukan bagi golongan eropa saja, namun kesempatan bagi golongan pribumi mulai terbuka sejak tahun 1907. Sampai dengan bubarinya pada tahun 1914, pelatihan di Meester

Cornelis ini telah menghasilkan 13 perwira pribumi. Perwira pribumi yang merupakan lulusan Meester Cornelis diantaranya adalah Oerip Soemohardjo, Holland Soemodilogo, A. H. Kawilarang, Wardiman Wirjosapoetro, dan Benjamin Thomas Walangitang (Bouman, 1995: 368-370).

Pada tahun 1913 oleh pemerintah kolonial Belanda diputuskan untuk pendidikan militer harus terkonsentrasi di Belanda. Selain dari pertimbangan segi ekonomis dan keefektifan, pendidikan yang dilakukan di Belanda akan memberikan pengalaman bagi calon perwira mengenai keadaan di Belanda dan Eropa dengan pelatihan dan peralatan yang lebih lengkap. Kemudian juga mereka akan paham dan memiliki pengetahuan jika dibutuhkan untuk berdinias di Belanda. Pada tahun 1916 akhirnya mulai terbukalah kemungkinan bagi calon perwira pribumi untuk dididik di Belanda, meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit. Dengan terbukanya kesempatan ini, tercatat antara tahun 1919 sampai dengan 1939 sudah sebanyak 27 taruna pribumi yang berhasil menempuh pendidikan di KMA di Breda (Klinkert, 2003:49). Untuk perwira pribumi yang merupakan lulusan KMA Breda diantaranya adalah Sultan Sjarief Hamid Alkadrie, Djatikoesoemo, Didi Kartasasmita, Poerbodipoero Soemitro, dan Soerjadi Soeriadarma (Bouman, 1995:378-381).

Dilihat dari latar belakang pendidikan, para perwira KNIL ini terbagi dua yaitu mereka yang merupakan lulusan dari sekolah perwira *Inlandsche Officieren School* (IOS) di Meester Cornelis dan juga yang lebih elit yaitu dari lulusan (KMA) di Breda. Perwira pribumi awalnya hanya berasal dari lulusan Meester Cornelis, namun setelah tahun 1915 mulai terdapat orang pribumi yang mengikuti pelatihan di KMA Breda. Hingga sebelum Perang Dunia II terdapat 21 orang pribumi yang berhasil mengikuti pelatihan militer di KMA Breda. Lama pendidikan di kedua sekolah perwira tersebut sebenarnya sama yaitu selama 3 tahun, namun karena lulusan KMA Breda mendapatkan pelatihan langsung di Belanda, maka dianggap memiliki keterampilan yang lebih baik (Matanasi, 2012:4).

Pendidikan militer KNIL mengalami perkembangan pada saat menjelang perang dunia pertama. Pada waktu tersebut satuan penerbangan muncul sebagai unsur yang penting dalam kekuatan militer. Berkaitan dengan hal tersebut, KNIL mulai merintis sekolah penerbangan yaitu dengan nama Militaire Luchtvaart (ML) pada tanggal 30 Mei 1914. Di Kalijati dan Surabaya juga mulai dibuka Marine Luchtvaart Dienst (MLD), namun pelatihan ini hanya diperuntukkan bagi orang Belanda saja, orang pribumi tidak ada yang memiliki kesempatan mengikutinya. Pelatihan ini awalnya mengalami kendala karena kekurangan peralatan dan amunisi pesawat. Baru setelah perang dunia pertama selesai pelatihan ini dapat berjalan efektif (Loo & Tjepkema, 2008:229,230). Dinas pelatihan militer perwira KNIL tersebut terus berlangsung dan tidak mengalami perubahan sampai dengan menjelang terjadinya perang dunia II.

Reformasi Dinas Pelatihan KNIL: CORO, KMA Bandung, VVC, dan Wajib Militer

Dinas pelatihan militer perwira KNIL tersebut terus berlangsung dan tidak mengalami perubahan sampai dengan menjelang terjadinya perang dunia II. Perubahan sistem pelatihan militer baru terjadi ketika munculnya ancaman perang pasifik dengan kemungkinan ekspansi militer Jepang. Keadaan darurat peperangan ini secara langsung berdampak terkait kebutuhan jumlah personil tambahan yang semakin banyak. Melalui keadaan darurat tersebut kemudian dibuatlah sebuah pelatihan militer yang ditujukan untuk merekrut golongan perwira cadangan. Perekrutan perwira cadangan merupakan bagian persiapan memperkuat angkatan perang disamping dengan memperkuat di bidang alutsista.

Sejak tahun 1938 di Bandung mulai dibentuk pelatihan *The Corps Opleiding Reserve Officieren* atau CORO (Sekolah Perwira Cadangan). Pelatihan di CORO selain digunakan untuk merekrut dan melatih para perwira cadangan, juga digunakan untuk menyeleksi kadet-kadet terbaik yang akan dikirim ke pelatihan di Akademi Militer. Mereka yang berhasil lulus di CORO akan menerima pelatihan lanjutan di KMA, sedangkan yang nilainya tidak

mencapai level yang disyaratkan akan langsung dikirim ke dalam korps pasukan sebagai vaandrig (pembantu letnan calon perwira) untuk memimpin sebuah unit sebagai kepala seksi atau peleton (Rocher, 1996:76).

Angkatan pertama pelatihan di CORO berjumlah sekitar 30 orang dan hanya ditujukan bagi golongan kulit putih saja. Pelatihan di CORO kemudian mengalami perubahan pada angkatan yang kedua dengan dibukanya kesempatan bagi golongan pribumi. Untuk mengikuti pelatihan terdapat persyaratan yaitu harus berijazah HBS atau AMS. Pelatihan dalam CORO terbagi menjadi beberapa tahapan dan juga harus melalui seleksi yang ketat. CORO dibagi dalam beberapa kelas dengan pelatihannya berlangsung selama sembilan bulan. Prajurit yang berada pada bidang artilleri mengikuti pelatihan lebih lanjut yang terpisah yaitu di *Depot Mobile Artillery* (DMA di Cimahi) (Bouman, 2002:3). Bagi yang sudah mengikuti pelatihan di CORO lulusan ini akan langsung memulai pelatihan di KMA dengan kurikulum tahun kedua. Lulusan dari CORO yang awalnya ditujukan untuk mengikuti pelatihan lanjutan di KMA Breda kemudian ditujukan mengikuti pelatihan di Akademi Militer baru yang dibentuk di Bandung (Matanasi, 2011:72,74).

Pusat pelatihan perwira KNIL (KMA) yang sebelumnya telah berlangsung di negeri Belanda yaitu di Breda mengalami perubahan setelah Belanda secara resmi diduduki oleh Jerman pada tanggal 15 Mei 1940 (Mason, 1963:548-580). Pendudukan ini berdampak pada penutupan sekolah militer di Breda. Belanda yang telah diduduki oleh tentara Nazi Jerman kini tidak dapat lagi mendukung dan menyuplai kekuatan militer di Hindia Belanda. Keadaan tersebut menjadi semakin genting dan buruk setelah melihat keadaan stabilitas di kawasan Asia Pasifik yang semakin memanas dengan sikap agresif Jepang yang menjadi sebuah ancaman yang nyata.

Melihat keadaan tersebut, oleh beberapa petinggi militer Belanda kemudian diputuskan untuk mendirikan sebuah akademi militer di Hindia Belanda yang terletak di Bandung. Persiapan pendirian Akademi Militer Kerajaan (KMA) di Bandung sendiri berlangsung selama sekitar lima bulan. Pembukaan KMA Bandung

kemudian dapat terlaksana pada tanggal 1 Oktober 1940. Letnan Jenderal G.J. Berenschot selaku Panglima Tertinggi KNIL secara langsung membuka pelatihan ini. Peresmian tersebut mendapat respon yang cukup besar dengan dihadiri oleh berbagai tokoh mulai dari tokoh militer, anggota Volksraad, dan juga tokoh sipil seperti Walikota dan Bupati Bandung (*Soerabaja Sch-handelsblad*, 1 Oktober 1940:2).

Akademi Militer Kerajaan (KMA) di Bandung ini awalnya hanya memakai nama *Militaire Academie* (MA) dengan direktur atau komandan pertama yang ditugaskan untuk memimpin adalah Mayor P.G. Mantel (*De Indische Courant*, 28 Oktober 1940:1). Akademi Militer Kerajaan Bandung dalam eksistensinya telah berhasil meluluskan 228 kadet perwira yang terbagi ke dalam tiga angkatan. Pelatihan untuk angkatan pertama dimulai pada tanggal 1 Oktober 1940. Untuk angkatan pertama semua kadet diambil dari para lulusan CORO angkatan tahun 1938/1939 yang berjumlah sebanyak 30 orang. Kadet angkatan pertama yang mengikuti pelatihan hanya terdiri dari golongan eropa, hal ini karena hanya orang Belanda saja yang awalnya diperbolehkan masuk CORO (*De Sumatra Post*, 30 September 1940:3).

Bagi golongan pribumi kesempatan untuk masuk KMA Bandung baru bisa pada angkatan kedua. Kesempatan bagi golongan pribumi terbuka setelah para tokoh militer Belanda menyadari bahwa keadaan pertahanan di Hindia Belanda yang tidak cukup kuat ini membutuhkan dukungan yang masif dari golongan pribumi. Mr. Mogot merupakan tokoh yang mengusulkan agar golongan pribumi diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan di tingkat yang lebih besar yaitu untuk kategori perwira. Penduduk pribumi harus memiliki bagian yang lebih besar dan dapat terlibat langsung agar dapat membentuk pertahanan nasional yang kuat. Walaupun menyarankan agar lebih terbuka kepada golongan pribumi, namun Mr. Mogot juga memperingatkan agar para kadet tersebut memang benar-benar orang yang spesial dan juga kalo bisa agar setiap daerah atau kewilayahannya seperti Jawa, Sunda, Manado, Ambon, Batak, dan yang lainnya dapat mengirimkan setidaknya satu wakil untuk dijadikan calon perwira (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 28 Februari 1941:2).

Perekrutan bagi calon kadet angkatan tahun kedua di KMA Bandung mulai dibuka pada bulan Mei tahun 1941. Pendaftar adalah dari mereka yang mengikuti pelatihan CORO yang telah diseleksi kembali. Nama-nama kadet pribumi yang berhasil masuk pada pelatihan angkatan tahun kedua adalah dibagian infanteri A.H. Nasution, Aminin, Rachmat Kartakusuma, Mantiri, Liem King Ien, Lim Kay Hoen, A.E. Kawilarang. Untuk bagian artilleri terdapat satu orang yaitu Askari, dibagian geni juga ada satu, yaitu T.B Simatupang, serta untuk dibidang administrasi terdapat dua orang, yakni Samsudarso dan Tan (Ramadhan, 1988:14-16). Untuk calon kadet pribumi yang tidak berhasil lolos seleksi KMA Bandung ada nama Sitanala, Bajuri dan Sasraprawira. Mereka yang tidak berhasil lolos seleksi kemudian langsung diterjunkan di kesatuan lapangan sebagai pembantu letnan (Rocher, 1996:90).

Diklat baru pelatihan di KMA Bandung berusaha semaksimal mungkin untuk meniru adat kebiasaan yang ada di Breda. Untuk bisa mempertahankan kebiasaan dan terminologi Breda, terdapat lima letnan yang berasal dari KMA Breda yang menjadi instruktur dalam pelaksanaan pelatihan. Kehadiran mereka ini ditujukan agar mampu mentransfer terkait elemen karakteristik tradisi yang ada di KMA Breda dan kebiasaan korps disana. Walaupun sebagian besar materi pelatihan sesuai dengan yang ada di Breda, namun tetap dilakukan semacam adaptasi terkait teknik peperangan modern di daerah tropis (Voskuil, 1996:53)

Seorang kadet di KMA Bandung sesuai dengan karakter yang ada di Breda dipanggil dengan sapaan jonker. Nama jonker sendiri memiliki arti yang terhormat, yang ditujukan untuk golongan bangsawan. Penamaan ini muncul karena dalam budaya militer Belanda, mereka yang berhak mengikuti pelatihan KMA Breda merupakan orang terpilih yang hanya berasal dari golongan bangsawan (Simatupang, 1991:88). Kemudian untuk pelaksanaan pelatihan, sebelum menjalani pelatihan para kadet awalnya akan dibagi terlebih dahulu sesuai abjad ke dalam kelas-kelas yang terdiri dari lima belas orang. Pembagian kelas tersebut terutama diterapkan untuk kelas di bagian infanteri karena pada kelas yang lain para pesertanya lebih sedikit,

misalnya untuk kelas geni jumlah siswa secara keseluruhan hanya sebanyak 10 orang (Bouman, 2002:66).

Pada masing-masing bagian yaitu divisi infanteri, artilleri, geni, dan administrasi memiliki kelas yang terpisah. Materi yang diberikan juga sesuai dengan bagian masing-masing. Latihan yang diberikan berpedoman pada buku-buku pedoman atau voorschrift yang ditulis lengkap pada tiap-tiap bidang. Voorschrift ini terbagi menjadi beberapa bagian mulai dari pedoman pelatihan umum baris-berbaris, cara menembak, pemeliharaan senjata, sampai dengan pedoman pelatihan khusus untuk bidang masing-masing. Diantara *voorschrift* tersebut terdapat yang terpenting dan dipelajari di semua kesatuan KNIL yaitu *Voorschrift omtrent de Politiek Politionele Taak van het Leger* (Pedoman mengenai Tugas Politik Polisionil Tentara) yang disingkat VTPL. Untuk pelatihan sendiri mulai dari angkatan tahun kedua mengalami perubahan dimana pelatihan dipersingkat satu tahun karena mengingat kebutuhan perwira yang mulai mendesak (Simatupang, 1991:84).

Pembelajaran lanjutan juga kemudian dilakukan untuk meningkatkan keterampilan diantara para kadet pada masing-masing divisi. Di bagian geni misalnya yang merupakan bagian insinyur pasukan militer, diberikan materi yang berbasis matematika dan ilmu bangunan, ilmu pembangunan jalan dan ilmu bangunan air. Kemudian untuk bagian artilleri mendapat pelatihan lanjutan seperti mengenai artilleri Anti-Pesawat dengan menggunakan senjata berkaliber 4 cm dan 8 cm. Di bidang administrasi militer, para kadet memiliki tambahan mata pelajaran mengenai logistik dan bantuan medis (Bouman, 2002:71).

KMA Bandung mulai membuka pelatihan untuk angkatan yang ketiga pada bulan Oktober 1941. Pembukaan untuk angkatan ketiga berselang sekitar enam bulan dari angkatan yang kedua. Berbeda dengan angkatan yang sebelumnya, untuk angkatan ketiga ini terdiri dari para kadet yang langsung mengikuti pelatihan di Akademi Militer tanpa harus melalui pelatihan di CORO terlebih dahulu. Diantara kadet angkatan ketiga terdapat nama kadet pribumi seperti Ahmad Yani, Soeprapto, Mokoginta, Suryo, Suriosumarno, Abdulkadir,

Satari, dan Susatio (Nasution, 1982:63) dan (Simatupang, 1991:84). Kemudian untuk membedakan pangkat diantara masing-masing angkatan, kadet di KMA Bandung dapat dibedakan dari tanda yang tertera di bahu mereka. Kadet tahun pertama pada penutup bahu mereka berwarna perunggu, tahun kedua berwarna perak, dan tahun ketiga berwarna emas (*De Sumatra Post*, 4 Oktober 1941:3).

Setelah pembentukan Akademi Militer di Bandung bisa berjalan dan dinilai positif, kemudian muncul ide untuk juga membentuk pelatihan pilot cadangan bagi angkatan udara. Gagasan untuk melatih para pilot cadangan muncul dari para petinggi di angkatan udara termasuk dari R.W.G.A Wittert van Hoogland selaku kepala *Koninklijke Nederlandsch-Indische Luchtvaart Maatschappij* (KNILM) atau maskapai penerbangan Hindia Belanda, sebagai bentuk persiapan menghadapi perang pasifik. Gagasan tersebut kemudian diwujudkan dengan kesepakatan pendirian *Vrijwillig Vlieger Corps* (Korps Penerbang Sukarela) di bulan Maret 1941. Lulusan dari pelatihan ini nantinya akan diterjunkan sebagai pilot di kesatuan ML (*Militaire Luchtvaart*/ Angkatan Udara) dan MLD (*Marine Luchtaartdienst*/ Angkatan Laut). Pembiayaan dan logistik didalam pelatihan VVC berada dibawah naungan NILF (*Nederland Indisch Luchtvaart Fonds*). Syarat untuk bisa mengikuti pelatihan ini adalah harus berusia 18 hingga 27 tahun dan harus lulus inspeksi terlebih dahulu. Pelatihan VVC tersebar di beberapa daerah dengan lima diantaranya berada di pulau Jawa (Tjepkema, 2018:37).

Salah satu pusat pelatihan VVC yaitu yang berada di Bandung diresmikan pada tanggal 29 September 1941. Peresmian tersebut dihadiri langsung oleh Panglima Angkatan Darat, Letnan Jenderal O.J. Berenschot dan Kepala Staf Umum, Mayor Jenderal H.ter Poorten. Disebutkan bahwa terdapat 21 orang yang akan menjadi kelompok pertama dalam pelatihan yang dibuka di Bandung. Pelatihan ini tidak hanya ditujukan bagi orang Belanda, rakyat pribumi juga dipersilahkan untuk mengikutinya. Banyak pemuda yang mulai mendaftar. Pusat pelatihan Bandung sendiri telah disediakan tujuh pesawat latih Tiger-Moth (*Bataviaasch nieuwsblad* , 29 September 1941:3).

Selain membangun dinas akademi pelatihan militer, pemerintah kolonial Hindia Belanda juga memutuskan untuk membentuk pasukan milisi. Kebijakan pemerintah kolonial untuk mempersenjatai rakyat pribumi tersebut harus lewat berbagai pembahasan dan pertentangan yang panjang. Gagasan mengadakan milisi pribumi sebenarnya sudah ada pada tahun 1918 saat perang dunia pertama. Namun pada waktu itu pihak pemerintah kolonial masih merasa ragu dan khawatir jika kebijakan tersebut menjadi bumerang karena bisa membahayakan kekuasaan kolonialnya (Djajusman, 1978:25,26). Kebijakan wajib militer tahun 1918 kemudian diperkenalkan hanya untuk para warga negara Belanda saja. Namun akhirnya dikarenakan situasi perang dunia kedua yang lebih mendesak, maka pemerintah kolonial membuka mata dan menerapkan dinas militer wajib bagi pribumi. Angkatan wajib militer pribumi ini sebagian besar digunakan untuk memasok tenaga pertahanan di daerah pesisir dan pedalaman. Pria yang dipilih untuk mengikuti program ini yaitu berusia antara 18 dan 45. Mereka yang berusia 18–32 tahun ditugaskan sebagai milisi, dan mereka yang berusia 33–45 tahun ditugaskan sebagai *Home Guard*. Meskipun peraturan ini berlaku untuk seluruh Hindia Belanda, namun pada prakteknya hanya di Jawa, Minahasa (Sulawesi Utara) dan Ambon. Mereka yang berdinass di wajib militer bertugas antara 9 sampai 12 bulan dengan kontingen per angkatan yang diharapkan yaitu 3000 orang. Kebijakan ini datang cukup terlambat, dan gagal mengumpulkan jumlah yang cukup. (Lohnstein, 2018:5-6).

Mobilisasi Angkatan Tambahan dalam Satuan KNIL

Pada awal tahun 1942, KNIL telah mencapai jumlah 122.600 personil yang terdiri dari berbagai kategori. Unsur personil ini terdiri dari 45.800 orang Eropa, 55.600 orang pribumi, dan 21.200 ras campuran. Jika dilihat maka angka ini merupakan sebuah peningkatan yang besar jika dibandingkan pada tahun 1929 yang hanya berjumlah 38.568 personil. Namun perlu digaris bawahi bahwa jumlah tentara profesional dalam angkatan ini hanya sebesar 52.900 personil. Jumlah angka tersebut juga berkat

tambahan personil pensiunan KNIL yang diaktifkan kembali sebanyak 4.700 personal (Lohnstein, 2018:7). Korps-korps yang terdiri dari bekas-bekas personil militer ini digunakan untuk ikut membantu pengamanan wilayah dan melakukan penjagaan di obyek-obyek penting seperti pusat tenaga listrik dan yang lainnya sehingga tentara yang masih aktif dapat dikerahkan untuk melakukan tugas penting lainnya (Djajusman, 1978:29).

Kemudian mengenai jumlah personil KNIL yang berasal dari pasukan milisi berjumlah 21.300 untuk personil eropa dan 7.600 untuk pribumi. Selain itu juga terdapat tambahan milisi dari korps relawan yang sebagian besar terdiri dari masyarakat eropa. Mereka membentuk kesatuan *Stadswacht* (Pengawal kota) dan *Landwacht* (Pengawal negeri). Jumlah dari pasukan ini mencapai 27.500 personil. *Stadswacht* dibentuk untuk melakukan penjagaan dan perlindungan di kota-kota besar yang dianggap penting. *Landwacht* ditugaskan di pedesaan dan perkebunan agar bisa mempertahankan wilayah disekitarnya. Awalnya kesatuan ini hanya dibekali peralatan seadanya, namun secara bertahap menerima peralatan seperti senapan, pistol, dan beberapa senjata otomatis.

Walaupun telah meningkatkan jumlah personil yang signifikan, namun pada akhirnya tetap tidak bisa berbicara banyak dalam menghadapi serbuan tentara Jepang. Pembentukan dinas dan sekolah militer dalam keadaan yang mendesak dan dengan waktu pelatihan yang telah dipangkas, alhasil tidak bisa mendapatkan lulusan yang ideal terlebih pada angkatan ketiga yang relatif hanya mendapatkan pelatihan sekitar 4 bulan. Keadaan para milisi juga buruk ketika harus dihadapkan pada medan perang melawan tentara yang terlatih dari angkatan militer Jepang. Banyak dari mereka yang kemudian menjadi tidak terorganisir dan melarikan diri.

SIMPULAN

Pemerintah kolonial Hindia Belanda telah berupaya memperkuat angkatan perangnya sebagai bentuk persiapan menghadapi serangan militer Jepang. Kebijakan reformasi mulai digalakkan pada tahun 1936 dengan melakukan

pembaruan dan penambahan terkait alutsista. Kemudian setelah ancaman mulai terlihat didepan mata, pemerintah kolonial Hindia Belanda mulai semakin serius mempersiapkan strategi pertahanannya melalui pembentukan berbagai dinas pelatihan militer untuk merekrut personil tambahan. Awalnya dibentuklah sebuah korps perwira cadangan pada tahun 1938 dengan nama CORO. Pelatihan ini digunakan untuk melatih para calon perwira pemimpin pasukan milisi dan juga yang berhasil lulus bisa melanjutkan kepelatihan selanjutnya di KMA. Setelah pembentukan CORO, sebuah Akademi Militer juga kemudian dibentuk di Bandung karena akibat penutupan KMA di Breda yang mengakibatkan suplai personil perwira KNIL terputus. KMA Bandung sebagian besar mendapatkan kadet dari mereka yang pernah berlatih di CORO dan juga yang sebelumnya pernah menjalani dinas wajib militer. Dari lulusan KMA Bandung ini juga memunculkan berbagai tokoh militer yang berpengaruh seperti A.H Nasution, T.B. Simatupang dan A.E. Kawilarang. Kemudian juga terdapat Korps Penerbang Sukarela (VVC) dan pasukan milisi pribumi. Kelompok ini dibentuk pada masa menjelang perang, yaitu pertengahan tahun 1941 sehingga cukup terlambat dan belum bisa berbicara banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Baskara, N. (2009). *Kamikaze Aksi Bunuh Diri Terhormat Para Pilot Jepang*. Narasi.
- Bouman, B. (1995). Van Driekleur tot Rood-Wit; De Indonesische officieren uit het KNIE, 1900- 1950. *S-Gravenhage: Sectie Militaire Geschie- denis*.
- Bouman, B. (2002). De Koninklijke Militaire Academie 1940-1942. *Armamentaria*, 37.
- Buiskool, H. A. (1941). Uit De Geschiedenis Van Het Leger in Nederlandsch-Indië. *Militaire Spectator*, 110(1).
- Djajusman. (1978). *Hancurnya Angkatan Perang Hindia belanda KNIL*. Angkasa.
- Groen, P., & Groen, P. (2012). *Colonial warfare and military ethics in the Netherlands East Indies, 1816–1941*. January 2015, 37–41.

- <https://doi.org/10.1080/14623528.2012.719365>
- Groot, S. J. de. (2009). Gidsen, berichtbrengers, spionnen en krijgsgevangenen Optreden in voormalig Nederlands-Indië, 1900-1949. *Militaire Spectator*, 178(1).
- Joehana, W.K. (2018). *KNIL Dari Serdadu Kolonial Menjadi Republik*. Matapadi Pressindo.
- Kessel, V. I. (2014). West African Soldiers in The Dutch East Indies: From Donkos to Black Dutchmen. *Historical Society of Ghana*, 9(9), 41–60.
- Klinkert, W. (2003). The Indian Military Academy: The Academy That Never Was (1900-1940). *Officer Education: The Road to Athens! Royal Netherlands Military Academy*.
- Klinkert, W., & Groen, P. (2005). *De militaire school te meester cornelis een officiersopleiding in de oost, 1852-1896*.
- Kuntowijoyo. (2005). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Bentang Pustaka.
- Lie, R. (2012). Reaksi media peranakan terhadap perang Tiongkok-Jepang 1937-1939. *Lembaran Sejarah*, 9(1), 1–8.
- Lohnstein, M. (2018). *Royal Netherlands East Indies Army 1936 – 42*. Osprey Publishing. Loo, P. E. van, & Tjepkema, A. C. T. (2008). *De ontwikkeling van het Nederlandse luchtwapen Johan Zegers als prominent denker*. 637(4).
- Mason, H. L. (1963). War Comes to the Netherlands: September 1939-May 1940. Political Science Quarterly. *Political Science Quarterly*, 78(4).
- Matanasi, P. (2011). *Pribumi Jadi Letnan KNIL Trompet*.
- Moor, J. A. de. (2008). Afscheid van Indië? Counter-insurgency in Nederlands-Indië, 1816-1949. *Militaire Spectator*, 177(3).
- Nasution, A. H. (1982). *Memenuhi panggilan tugas: jilid 1 kenangan masa muda*. Gunung Agung.
- Oktorino, N. (2016). *Di Bawah Matahari Terbit*. Elex Media Komputindo.
- Ramadhan, K. H. (1988). *A.E. Kawilarang: Untuk Sang Merah Putih*. Pustaka Sinar Harapan.
- Rocher, J. (1996). *Les Cadets de Bandung (1940-1945)*. 51, 67–94.
- Simatupang, T. B. (1991). *Membuktikan Ketidakbenaran Suatu Mitos : Menelusuri Makna Pengalaman Seorang Prajurit Generasi Pembebas Bagi Masa Depan Masyarakat, Bangsa Dan Negara*. Pustaka Sinar Harapan.
- Suyono, R. P. (2003). *Peperangan Kerajaan di Nusantara: penelusuran kepustakaan sejarah*. Grasindo.
- Tjepkema, A. C. (2018). Kunst en vliegwerk: Personeel en organisatie bij de twee vooroorlogse Indische militaire luchtvaartdiensten. *Mars et Historia*, 1–40.
- Wijnmalen, T. C. L. (1883). De artillerie - school te Weltevreden. *De Indische Gids*, 5(1).
- ### Sumber Koran dan Majalah
- Bataviaasch Nieuwsblad*, 28 Februari 1941, hlm. 2.
- Bataviaasch Nieuwsblad*, 29 September 1941, hlm. 3.
- De Sumatra Post*, 30 September 1940, hlm. 3.
- De Sumatra Post*, 4 Oktober 1941, hlm. 3.
- Soerabaia Sch-handelsblad*, 1 Oktober 1940, hlm. 2.